

KENDALA JAKSA DALAM EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGANTI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur)

AGA WIRANATA
wiranataga@gmail.com

ABSTRACT

The issue of recovery asset in the management of corruption practices has become a serious problem. It is due to some facts revealed that some corruption cases being convicted are not compatible with the execution in terms of criminal restitution money. With the Juridical Obstacles: Convict died. Legally, law does not explicitly regulate people who intend to pay but can not afford to pay all at once. Non Judicial Constraint: Problems who are assigned to calculate the loss to the state and how existence of compensation money management convict has moved domicile but are not known to exist. The steps to be done by Country is when the investigation, the prosecutor made an attempt to restore the loss by doing confiscation. To address uncertainty of convict or where convict treasure, the prosecutor cooperating with police to investigate the presence of the convict and convict treasure and also ask for help from people around. It turns out that the implementation of criminal money substitute is not as easy as imagined.

Keywords: Constraint, The prosecutor, Criminal Money Substitutes, Corruption.

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari dikeluarkannya Undang-undang Tipikor adalah tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi hukuman yang menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi, tetapi harus juga dapat mengembalikan harta kerugian Negara yang telah di korupsi. Pengembalian kerugian Negara ini memiliki tujuan dan harapan lain terkait ketidakmampuan Negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan.

Kuatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk serius memerangi korupsi direspon oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-undang anti korupsi yang baru (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Alasan pemerintah mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 karena UU No. 3 Tahun 1971 dianggap sangat lemah dan ringan, khususnya dalam hal pidana dan ppidanaan.

Adapun ketentuan mengenai Uang Pengganti diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 18

- 1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barangbntidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a timbul pertanyaan apakah barang-barang tersebut harus kepunyaan terdakwa atau dapat juga dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan orang lain? Pertanyaan tersebut dapat dijawab “ya” dengan alasan seperti yang akan dikemukakan pada pasal 19:

Pasal 19

- 1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- 3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- 5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan “harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, jangan hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang “masih dikuasai” oleh terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan

termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain.

Di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c tersebut tidak dijelaskan apakah perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan kepunyaan terpidana, atau apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana harus dilakukan di dalam lingkungan usaha dari perusahaan yang ditutup. Untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, tidak perlu perusahaan yang dimaksud adalah kepunyaan terpidana, cukup dengan syarat asal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana masih di dalam lingkungan usaha dari perusahaan yang ditutup.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan “hak-hak tertentu” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d adalah termasuk hak-hak yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa, yang tidak termasuk hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, misalnya hak untuk mengekspor atau mengimpor barang-barang tertentu atau hak untuk mengembangkan suatu kawasan tertentu.¹

Uang Pengganti dalam perkara korupsi mengandung banyak permasalahan yang ternyata cukup rumit dalam implementasinya, diantaranya belum mencapai kesempurnaan tentang seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini. Salah satunya adalah penerapan pada Undang-undang No. 20 tahun 2001 tersebut masih terkendala karena kurang lengkap dan tegas dalam pengaturan tata cara

¹ Wiyono, **Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 143.

pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian uang Negara yang dikorupsi.

Keberadaan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti bagi terpidana korupsi dinilai berjalan kurang efektif. Ini karena terpidana banyak yang memilih hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Uang pengganti hanyalah suatu pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Uang pengganti tidak sepenuhnya dapat ditagih kepada si terpidana korupsi, sehingga terhadap si terpidana di subsiderkan dengan hukuman badan berupa penjara untuk mengganti kekurangan dari uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan. Artinya pelaksanaan hukuman subsider badan tetap tidak dapat memulihkan kerugian Negara. Padahal Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 itu tidak mengatur mengenai subsidair hukuman badan berupa kurungan, sedangkan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 telah mengatur mengenai subsidair hukuman badan (penjara). Namun dengan adanya ketentuan mengenai subsidair hukuman badan tersebut memudahkan terpidana untuk terlepas dari pembayaran Uang Pengganti.

Dengan adanya ketentuan Pidana Tambahan Uang Pengganti, pada kenyataannya kerugian Negara akibat dari tindak pidana korupsi tidak ditagihkan sepenuhnya terhadap si terpidana. Sehingga untuk menutupi atau mengganti kerugian uang negara maka terpidana di subsidairkan dengan hukuman badan.

Sehingga tunggakan tersebut dihapuskan dari terpidana, dan kerugian Negara tidak dapat dikembalikan.

Persoalan pengembalian kerugian negara (*recovery asset*) dalam praktek penanganan perkara korupsi telah menjadi persoalan serius, sebab berdasarkan beberapa fakta yang terjadi banyak perkara korupsi yang telah dijatuhi vonis, namun dalam hal pelaksanaan pidana uang pengganti sulit untuk terwujud. Ternyata pelaksanaan pidana uang pengganti tidak semudah yang dibayangkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh data yang menyebutkan dalam kurun waktu 3 (triwulan) terhitung dari bulan Januari sampai dengan September 2013 terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) kasus mengenai tindak pidana tambahan uang pengganti pada perkara korupsi. Dalam kurun waktu 3 (tiga) triwulan tersebut, total Uang Pengganti yang ditagihkan Rp.65,516,799,005 sedangkan yang masuk kekas Negara hanyalah Rp. 853,303,249 sehingga total kerugian yang tidak dapat dikembalikan kepada Negara berkenaan dengan pelaksanaan uang pengganti dalam kurun waktu 3 (tiga) triwulan Januari-September 2013 sebesar Rp. 64,663,495,756. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pidana tambahan uang pengganti terdapat kendala kendala didalamnya, kendala tersebut ada yang bersifat yuridis maupun non yuridis.²

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimana cara mengantisipasi dan mengupayakan kinerja Jaksa dalam

² Wawancara dengan Responden Febrie Adriansyah selaku Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur, dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2013.

menagih kerugian Negara untuk menerapkan pidana tambahan uang pengganti tersebut secara lebih optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah kendala Jaksa dalam mengeksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana cara mengantisipasi dan mengupayakan kinerja Jaksa sebagai penyidik, dan penuntut umum dalam upaya pemulihan kerugian Negara untuk menerapkan eksekusi pidana tambahan uang pengganti tersebut secara lebih optimal ?

C. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Jenis Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari responden yakni penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur yang menangani kasus tindak pidana Korupsi, dan Data sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Populasi dalam peneliti ini adalah jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini berdasar pada cara pengambilan responden dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu³. Sampel dalam penelitian ini adalah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Responden yang dipilih dari sampel yang telah ditentukan dan nantinya akan diambil kevalidan data dengan mencantumkan identitas lengkap guna keabsahan data penelitian. Dengan responden yang berjumlah 4 yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Bapak Arminsyah, Asisten intelijen

³ Sutrisno Hadi, 1989, **Metodologi Research jilid 1**, Yogyakarta: Andi Offset, hal 42

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Bapak Andi Herman, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Febrie Adriansyah. Kepala Bagian Penyidikan seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Bpk. Rohmadi. Berdasarkan data-data yang diperoleh dan kemudian dianalisa, selanjutnya digunakanlah teknik *deskriptif analitis*,⁴ yaitu peneliti mencoba untuk memaparkan secara menyeluruh data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

D. PEMBAHASAN

1. Kendala Kendala Yang Berkaitan Dengan Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti.

Begitu maraknya kasus korupsi dewasa ini tidak terlepas dari ketidakpuasan dengan harta yang dimiliki oleh para pejabat atau mereka yang memiliki kekuasaan/kewenangan. Walaupun mereka yang melakukan korupsi telah divonis sebagai terpidana, namun tidak semuanya dapat membayar uang pengganti sebesar harta kekayaan mereka yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁵ Mereka hanya menjalani pidana pokok saja yakni pidana badan berupa penjara. Memang ketentuan membayar uang pengganti hanya suatu pidana tambahan. Akan tetapi membayar ketentuan membayar ketentuan uang pengganti

⁴*ibid*, hal 24

⁵ Wawancara dengan responden Asisten Tindak Pidana Khusus Bpk. Febrie Andriansyah.

hanya suatu pidana tambahan. Membayar ketentuan uang pengganti juga memnailiki tingkat kepentingan yang sama dengan memidanakan para koruptor, karena dengan membayar uang pengganti aset Negara dapat diselamatkan.

a) Kendala Yuridis

1. Masalah Apabila Terpidana Meninggal Dunia

Ada kendala kendala yang dihadapi oleh Negara dalam menerapkan ketentuan uang pengganti seperti terpidana meninggal dunia. Dalam hal terpidana meninggal dunia, apabila ditinjau dari Undang undang No.3 Tahun 1971 maka tanggungan uang pengganti terpidana dapat diwariskan kepada keluarganya. Sedangkan dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 apabila terpidana telah meninggal dunia maka tuntutan tersebut dianggap gugur demi hukum termasuk tanggungan uang penggantinya.⁶

2. Regulasi Belum Jelas

Secara yuridis tidak mengatur secara jelas orang yang berniat membayar namun tidak mampu membayar sekaligus (cicilan), hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 18 Undang undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang undang No. 20 Tahun 2001 pada ayat (2) menyebutkan :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Jadi, yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) tersebut adalah bahwa terpidana hanya diberikan jangka waktu 1 bulan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mampu membayar UP dalam waktu 1 bulan tersebut,

⁶ Wawancara dengan responden bapak Andi Herman selaku Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur.

maka dijatuhi hukuman subsider UP yakni kurungan badan (penjara) yang lamanya sudah ditentukan oleh putusan pengadilan.”

3. Berlakunya dua Undang Undang sekaligus mengenai Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Tata cara pelaksanaan Uang Pengganti, penanganannya terdiri dari 2 sumber hukum. Apabila dilihat dari Undang Undang No. 3 Tahun 1971 maka mekanismenya ialah dengan cara ditagih melalui gugatan perdata yang dilimpahkan kepada jaksa Datun apabila tidak sanggup bayar. Apabila terpidana sungguh sungguh tidak mampu membayar uang pengganti, maka tugas jaksa selaku eksekutor yakni untuk melakukan pelacakan aset berupa mencari serta meminta bantuan kepada aparat setempat untuk memberikan keterangan maupun bukti bahwa terpidana benar-benar tidak memiliki harta untuk membayar Uang pengganti, setelah itu kewajiban terpidana untuk membuat surat keterangan tidak mampu membayar Uang Pengganti. Namun sesuai dengan prinsip hukum perdata, yakni walaupun telah dihapus bukukan piutangnya, hutang tersebut tidak akan hilang.⁷

Dalam Undang undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001, mekanisme penagihannya apabila terpidana tidak mampu membayar dalam jangka satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana subsider kurungan badan (penjara). Uang pengganti yang belum

⁷ Wawancara dengan responden bapak Andi Herman selaku Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur.

terbayarkan oleh terpidana dianggap telah dibayar apabila terpidana sudah menjalani hukuman subsider kurungan badan tersebut.⁸

Menurut penulis dengan berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 maka melemahkan keefektifitasan dari pelaksanaan uang pengganti. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana subsider hukuman badan (penjara). Hal ini mengakibatkan kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak dapat dikembalikan, karena uang pengganti yang ditagihkan kepada terpidana dianggap lunas dengan adanya subsider hukuman badan yang telah dijalani oleh terpidana.

b) Kendala Non Yuridis

1. Masalah Siapa Yang Ditugasi untuk Menghitung Kerugian Negara dan Bagaimana Pengelolaan Pengelolaan Uang Pengganti

Akibat tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang tidak direncanakan secara baik, muncul persoalan kedua, yakni tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Seperti telah disinggung di atas, ketidakjelasan mengenai pengaturan ini berimplikasi terhadap semakin beratnya tugas hakim dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang harus ditetapkan.

Permasalahan ini bersumber pada satu persoalan, yakni SDM dari hakim tersebut tidak yang memadai untuk *mengcover* masalah ini. Idealnya apabila menyangkut penghitungan jumlah kerugian maka harus dilakukan oleh lembaga

⁸ Wawancara dengan responden bapak Andi Herman selaku Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur.

yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya, misalnya BPK atau kantor akuntan publik (auditor) yang memang bergerak dalam bidang ini. Selama ini efektivitas penerapan metode ini sangat bergantung pada perhitungan kerugian negara yang nantinya disertakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketidakcermatan dalam perhitungan kerugian negara justru dapat menyebabkan target pengembalian uang negara yang telah dikorupsi sulit tercapai.⁹

Perihal mengenai minimnya pengaturan pidana uang pengganti ini selanjutnya berimplikasi kepada siapa yang berwenang mengelola dana hasil sitaan dari para koruptor. Ketidakjelasan mengenai mekanisme pengelolaan uang ini telah menimbulkan dugaan bahwa dana yang telah berhasil diselamatkan malah dikorupsi kembali oleh lembaga penegak hukum yang mengeksekusi, dalam hal ini Kejaksaan. Mantan Ketua BPK, Anwar Nasution bahkan pernah menuding Kejaksaan Agung dinilai tidak mematuhi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 270 tentang pelaksana putusan pengadilan dan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan guna melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi akibat besaran dana hasil eksekusi yang dikelola oleh Kejaksaan sangat tidak jelas. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa eksekusi terhadap hukuman uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara pidana korupsi, yang ditetapkan pengadilan senilai Rp 6,67 triliun selama tahun anggaran 2004 dan dikelola oleh Kejaksaan Agung, hingga kini belum berhasil ditagih. Sebagai tindak lanjut atas kondisi ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit-investigasi

⁹ Wawancara dengan responden Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur Bpk. Arminsyah.

untuk menelusuri pengelolaan dana tersebut. Fokus audit yang akan dilakukan meliputi berapa total dana yang dikelola, berapa bunganya, dan ke mana larinya bunga tersebut.¹⁰

2. Sulitnya Mencari Domisili Terpidana

Kendala selanjutnya adalah keberadaan harta terpidana telah pindah domisili namun tidak diketahui keberadaannya. tidak ada database tentang aset seseorang, secara administratif pemerintahan kita belum menerapkan *single identity*.

Contoh : e-ktip. tujuannya agar lebih mudah dalam mencari identitas terpidana hanya dengan satu identitas dengan beberapa aset korupsi. kendala adalah sulitnya menemukan aset terpidana karena banyaknya identitas yang digunakan oleh para pelaku.¹¹

3. Persekongkolan antara Terpidana Dengan Tim Pemeriksa

Ada juga kendala lainnya seperti adanya persekongkolan antara si terpidana dengan tim pemeriksa harta kekayaan si terpidana. Akibatnya terjadi manipulasi data yang menyatakan bahwa si terpidana tidak memiliki lagi harta kekayaan yang cukup untuk membayar uang pengganti.

Sudah barang tentu untuk dapat membawa harta atau aset koruptor kedalam sidang pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik itu oleh jaksa penuntut umum akan diajukan sebagai barang bukti dihadapan hakim dalam tahap penuntutan. Proses penyitaan ini adalah proses yang paling sulit dalam

¹⁰ Ismansyah, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2007, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/viewFile/1137/972>, diakses pada tanggal 26 Januari 2014.

¹¹ Wawancara dengan responden Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur Bpk. Andi Herman.

upaya pengembalian kerugian negara sebagaimana dikemukakan diatas. Banyak cara dan jalan yang bisa dipilih oleh koruptor untuk mengamankan hasil korupsi, dari yang paling sederhana sampai yang canggih dengan menggunakan rekayasa finansial (finansial engineering) yang tersedia dalam praktek bisnis didalam negeri maupun diluar negeri. Kesulitan itu menjadi bertambah, karena adanya tersangk, terdakwa, atau terpidana yang melarikan diri keluar negeri dan sudah tentu dengan membawa asetnya.¹²

4. Rendahnya Standar Kesejahteraan dan Standar Moral Para Pejabat Publik

Masih rendahnya standar kesejahteraan dan standar moral para pejabat publik menjadi salah satu hambatan yang cukup pelik.¹³ Akibatnya output kinerjanya menjadi kurang profesional, tidak transparan dan tidak memiliki akuntabel. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah adanya loyalitas yang berlebihan kepada pimpinan dikarenakan adanya kekhawatiran akan dimutasi ketempat yang tidak disukai atau tidak sesuai dengan kompetensi PNS yang bersangkutan. Pejabat yang memiliki kekuasaan terkadang hanya asal mengeluarkan perintah kepada bawahannya meskipun perintah tersebut tidak memiliki relevansi secara langsung dengan jabatannya, tetapi tetap harus dilaksanakan. ketika ada masalah, yang bersangkutan berlindung dibalik kekuatannya yang lain dikorbankan.¹⁴

¹² Wawancara dengan responden Bapak Febrie Adriansyah Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

¹³ Wawancara dengan Bapak Febrie Adriansyah Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

¹⁴ Wawancara dengan responden Bapak Febrie Adriansyah Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

B. Upaya Upaya Yang Berkaitan Dengan Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti.

Pemberantasan korupsi serta penyelamatan aset Negara, hendaknya harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Tidak hanya melalui jalur represif tetapi harus secara simultan melalui langkah langkah preventif dengan membangun kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan keteladanan dari para aparat penegak hukum itu sendiri untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agar penggalangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif membantu aparat dalam pemberian informasi untuk kepentingan penegakan hukum dalam berbagai tingkatan dapat berjalan dengan efektif.¹⁵

Jaksa selaku penyidik, ketika penyidikan maka jaksa melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian Negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka.

Pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana.

Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan.

¹⁵ Ismansyah, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2007, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/viewFile/1137/972>, diakses tanggal 26 Januari 2014

Terminology penyitaan bagi Jaksa ada 2 (tahap eksekusi):

- a. Setelah putusan ingkrah, jaksa melakukan penyitaan harta mana saja, bertujuan untuk mengumpulkan aset terpidana dalam rangka untuk memenuhi uang pengganti (*recovery asset*).
- b. sedangkan penyitaan dalam proses penyidikan hingga penuntutan, penyitaan terbatas terhadap barang / aset yang berhubungan langsung dengan kejahatan. Tujuan dari penyitaan pada tahap ini adalah untuk mengamankan guna untuk jaminan tersangka sebagai bukti dari hasil kejahatannya.¹⁶

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka JPU segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, sedangkan untuk ketidakjelasan alamat terpidana ataupun keberadaan harta terpidana maka jaksa bekerja sama dengan Kepolisian untuk menyelidiki keberadaan terpidana serta harta terpidana dan juga meminta bantuan dari masyarakat apabila sekiranya pernah mengetahui keberadaan terpidana yang dimaksud oleh JPU.¹⁷

Upaya mengembalikan harta Negara apabila tersangka lari ke luar negeri dibentuk tim pemburu koruptor atau tim terpadu pencarian tersangka dan terpidana tipikor. jadi melalui berbagai sarana baik termasuk perjanjian ekstradisi, MLA (*mutual legal assistance*) perjanjian timbal balik, hubungan resiprositas serta hubungan bilateral dengan Negara terkait.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Febrie Adriansyah Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Febrie Adriansyah Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

¹⁸ Wawancara dengan responden Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur Bpk. Andi Herman.

Untuk memperoleh informasi berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pejabat Negara, termasuk terhadap penelusuran keuangan tersangka yang disimpan melalui jasa perbankan, perlu dilakukan revisi terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang membatasi upaya aparat penegak hukum serta perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang tidak. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para aparat hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk menyelamatkan aset negara.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kendala kendala yang dihadapi oleh Negara dalam menerapkan ketentuan uang pengganti seperti :

a) Kendala Yuridis

1. Terpidana meninggal dunia.
2. Secara yuridis tidak mengatur secara jelas orang yang berniat membayar namun tidak mampu membayar sekaligus.
3. Berlakunya dua Undang Undang sekaligus mengenai Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang undang No 3 Tahun 1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

b) Kendala Non Yuridis

1. Masalah siapa yang ditugasi untuk menghitung kerugian negara dan bagaimana pengelolaan pengelolaan Uang Pengganti
2. Keberadaan harta terpidana telah pindah domisili namun tidak diketahui keberadaannya.
3. Adanya persekongkolan antara si terpidana dengan tim pemeriksa harta kekayaan si terpidana. Akibatnya terjadi manipulasi data yang menyatakan bahwa si terpidana tidak memiliki lagi harta kekayaan yang cukup untuk membayar uang pengganti.
4. Masih rendahnya standar kesejahteraan dan standar moral para pejabat publik

2. Upaya upaya yang dilakukan oleh Negara dalam menerapkan ketentuan uang pengganti seperti:

- a. Ketika penyidikan, jaksa melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian Negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka.
- b. Pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana.
- c. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari

penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan.

- d. Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka JPU segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, sedangkan untuk ketidak jelasan alamat terpidana ataupun keberadaan harta terpidana maka jaksa bekerja sama dengan Kepolisian untuk menyelidiki keberadaan terpidana serta harta terpidana dan juga meminta bantuan dari masyarakat apabila sekiranya pernah mengetahui keberadaan terpidana yang dimaksud oleh JPU.¹⁹
- e. Upaya mengembalikan harta Negara apabila tersangka lari ke luar negeri dibentuk tim pemburu koruptor atau tim terpadu pencarian tersangka dan terpidana tipikor. jadi melalui berbagai sarana baik termasuk perjanjian ekstradisi, MLA (*mutual legal assistance*) perjanjian timbal balik, hubungan resiprositas serta hubungan bilateral dengan Negara terkait.²⁰
- f. Untuk memperoleh informasi berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pejabat Negara, termasuk terhadap penelusuran keuangan tersangka yang disimpan melalui jasa perbankan, perlu dilakukan revisi terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang membatasi upaya aparat penegak hukum serta perlu dilakukan

¹⁹ Wawancara dengan Responden Bapak Febrie Adriansyah selaku Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur

²⁰ Wawancara dengan Responden Bapak Andi Herman selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa-Timur

sosialisasi kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang tidak. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para aparat hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk menyelamatkan aset negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ronny Haninjto Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.

Wiyono, **Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal

Ismansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, 2007, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/viewFile/1137/972>.

Wawancara

Wawancara dengan responden Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Bpk. Febrie Andriansyah

Wawancara dengan responden Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Bpk. Andi Herman

Undang undang

KUHAP.

Keppres RI Nomor 86 Th 1999 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.